

**AUDIT KEPATUHAN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT
MODAL KERJA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
TBK. KANTOR CABANG SYARIAH PALEMBANG
(STUDI KASUS PADA KOPRASI PLASMA MEKAR SARI JAYA)**

Chandra Satria

Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: chandras@stebisigm.ac.id

Abstrak

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Lembaga perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang telah diberikan bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan roda perekonomian. Bank menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman sehingga dapat membantu kelancaran aktivitas produksi dan memperluas kesempatan kerja. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data kualitatif yang didukung dengan penjabaran mengenai arti data tersebut. Laporan Keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya belum di audit oleh auditor independent. Hal ini menunjukkan data-data dalam laporan keuangan yang disajikan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya belum dapat dipastikan merupakan data-data yang menggambarkan kinerja Perusahaan sesungguhnya secara wajar karena belum diperiksa oleh pihak akuntan publik yang merupakan pihak independent dan memiliki wewenang untuk dapat memberikan analisa dalam bentuk penilaian wajar atau tidak wajar pada angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya tersebut. Belum teralisasinya pembayaran asuransi kebakaran atas koprasi plasma mekar sari jaya. Belum teralisasinya pembayaran asuransi kebakaran atas Koprasi Plasma Mekar sari Jaya akan mengurangi jaminan atas resiko yang akan diterima oleh PT. Bank BNI Syariah jika sewaktu-waktu terjadi bencana pada Koprasi Plasma Mekar sari Jaya seperti kebakaran yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya dalam melaksanakan pembayaran kreditnya.

Kata Kunci: *Audit Pemberian Kredit Modal*

DASAR PEMIKIRAN

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Lembaga perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang telah diberikan bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan roda perekonomian. Bank menghimpun dana dari

masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman sehingga dapat membantu kelancaran aktivitas produksi dan memperluas kesempatan kerja. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau kredit untuk membiayai usaha yang dijalankannya.

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Keberadaan Kredit Modal Kerja (KMK) ditengah masyarakat terutama pada pengusaha golongan kecil menengah dirasakan manfaatnya untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang bersifat umum, individu, selektif dan berbunga murah guna mengembalikan atau meningkatkan usaha serta pengembangan yang layak. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang mempunyai prosedur yang relative mudah dan sederhana, namun dalam penyaluran perlu pemahaman secara tepat dari pihak perbankan.

Penyaluran Kredit Modal Kerja pada Bank BNI Syariah kepada pengusaha memerlukan persiapan dan pengendalian resiko karena jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan cukup besar rata-rata kurang lebih 100 milyar per tahun dan bersifat lancar guna menunjang proses produksi yang berlangsung. Hal ini dilakukan agar pengembalian Kredit Modal Kerja dapat berlangsung dengan lancar dan tidak terjadi kredit macet yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian khususnya perbankan yang merupakan salah satu sumber ekonomi dana yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya (Politik, sosial budaya dsb). Guna kepentingan tersebut perlu diadakan suatu pemeriksaan agar pelaksanaan pemberian Kredit Modal Kerja yang ditetapkan dapat dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan

benar yang akhirnya akan menciptakan suatu pengendalian intern yang cukup andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka peranan kepatuhan merupakan hal yang sangat penting, dimana kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan pada pihak yang berwenang membuat kriteria. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang (Studi Kasus Pada Koprasi plasma mekar sari jaya)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian *auditing* secara umum dalam *A Statement of Basic Auditing Concept* (Halim, Abdul: 1997) yaitu :

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan criteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Selanjutnya menurut *American Accounting Association (AAA) Commite on Basic Auditing Concep* (Munawir,2002). Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan menilai bukti-bukti secara obyektif yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu pemeriksaan akuntansi yang sistematis terhadap data akuntansi klien, meliputi pengujian, pembuktian serta penganalisaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (klien) untuk memberikan pendapat atas wajar tidaknya posisi keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan selama satu atau beberapa periode pembukuan. Untuk

selanjutnya menilai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan PSAK secara benar.

Menurut “*Report of the committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Assosiation*” (Accounting Review, vol. 47), yaitu:

1. Suatu proses sistematis berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir.
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (atau entitas) yang membuat asersi tersebut.
3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi merupakan representasi yang dibuat perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok auditing. Asersi meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, laporan operasi intern dan surat pemberitahuan pajak (SPT).

Adapun jenis-jenis pemeriksaan menurut Boyton et al (Halim, Abdul:1997) sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan (*Financial statement audit*)
2. Pemeriksaan Kepatuhan (*Compliance audit*)
3. Pemeriksaan Operasional (*Operational audit*).

Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern.

1. Lingkungan pengendalian
 - a. Falsafah manajemen dan gaya operasi
 - b. Struktur organisasi
 - c. Komite Audit
 - d. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab
 - e. Metode pengendalian manajemen
 - f. Fungsi audit intern
 - g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian
 - h. Pengaruh ekstern

2. Sistem Akuntansi

3. Prosedur Pengendalian

Kebijakan dan prosedur dalam suatu satuan usaha dibagi menjadi lima yaitu:

a. Pemisahan tugas yang cukup

Yaitu Pemisahan penanganan aktiva dari akuntansi. Pemisahan otorisasi transaksi dari penanganan setiap aktiva. Pemisahan tanggung jawab operasi dari tanggung jawab penanganan pencatatan.

b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dari aktivitas

Otorisasi dalam bentuk umum dan khusus. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan di dalam organisasi. Sedangkan otorisasi khusus bagi transaksi yang khusus juga. Seringkali manajemen tidak bersedia menetapkan kebijakan otorisasi umum untuk beberapa jenis transaksi tertentu.

c. Dokumen dan catatan yang memadai

Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern (Edi Purnomo, 2004), yaitu :

“Seluruh kebijakan, prosedur serta praktek-praktek akuntansi yang dibuat oleh manajemen untuk membantu melindungi perusahaan dari kemungkinan salah pelaksanaan kegiatan usahanya, atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan dengan tujuan negatif yang berpotensi untuk menggagalkan tujuan usaha.”

Tujuan auditing ditinjau dari tujuan manajemen (Munawir, 2002) akuntansi merupakan rangkaian proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penyajian atau pelaporan dan penginterpretasian transaksi keuangan suatu perusahaan secara sistematis antara lain:

Hubungan Struktur Pengendalian Intern dengan Pemeriksaan Akuntan

Dengan pengendalian intern yang tidak baik, maka auditor akan menetapkan resiko pengendalian yang semakin tinggi dan akan berpengaruh terhadap pengujian kepatuhan khususnya terhadap hubungan dengan pengujian kepatuhan terhadap siklus kas pada hubungan struktur pengendalian intern terhadap pemeriksaan akuntan juga

ditunjukkan pada pengujian substantive dalam hal ini pengujian substantif terhadap kas yang menyangkut kewajaran penyajian saldo kas di neraca. Sehingga auditor akan semakin lama melaksanakan pemeriksaan dan pada akhirnya perusahaan akan rugi, baik karena struktur pengendalian intern yang jelek maupun *audit fee* yang akan dibayar.

Pengertian Kredit Modal Kerja

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin (Italia), yaitu *Creder* yang artinya kepercayaan (*to believe / to trust*). Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada seseorang/badan usaha berlandaskan kepercayaan (*faith*).

Kredit bila dikaitkan dengan kegiatan usaha (Wirasasmita et al, 2000), yaitu:

“Kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang/ badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (*bank*) dan debitur (*user*)”.

Unsur-unsur Kredit, seperti yang dijelaskan oleh Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1. Nilai Ekonomi
2. Keputusan Kredit
3. Pelaksanaan Kredit
4. Administrasi Kredit
5. Pengawasan Kredit

Prosedur Umum Perkreditan

Langkah-langkah umum yang harus ditangani oleh Bank didalam prosedur penyaluran kredit yaitu (Hasibuan, 2000):

1. Penyaluran kredit
 - a. Perencanaan penyaluran
 - b. Prosedur penyaluran kredit
 - c. Alokasi Penyaluran Kredit

Kebijakan Perkreditan Bank

Menurut Hasibuan (2000) Program perkreditan harus didasarkan pada asas:

1. Yuridis
2. Ekonomi
3. Kehati-hatian
4. Kebijaksanaan (*Policy*)

Pengendalian Intern Atas Kredit Modal Kerja

Tujuan/sasaran yang ingin dicapai dari pengawasan perkreditan itu sendiri (Muchdarsyah:2000) yaitu:

- a. Agar penjagaan/ pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern/intern bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dalam manual perkreditan surat-surat edaran agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

METODELOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis memilih objek dan tempat penelitian pada bagian perkreditan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Palembang yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Palembang No. 6768.

Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk membatasi agar permasalahan yang ditinjau tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai sistem pemberian Kredit Modal Kerja Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Palembang Pada Koprasi plasma mekar sari jaya.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sugiyono (2007):

- a. Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Karyawan PT. Bank BNI (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang,
- b. Data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan data yang telah diolah dari PT. BNI (persero) Tbk. Kantor Syariah Palembang, seperti sejarah singkat Bank BNI Syariah, visi dan misi Bank BNI Syariah, Prosedur pencairan kredit serta aktivitas Bank BNI Syariah.

Tehnik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab lisan secara langsung dengan pimpinan, karyawan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor cabang syariah Palembang yang memberi informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan kegiatan pencairan kredit dan prosedurnya.
- b. Observasi yaitu peninjauan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan penulis.
- c. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari melihat, mengutip laporan dokumen yang dipakai dan buku yang digunakan untuk kemudian diolah menjadi data penunjang dalam pembahasan nanti.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data kualitatif yang didukung dengan penjabaran mengenai arti data tersebut

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III yang memiliki sistem bagi hasil di bidang pertanian, terutama bagi hasil kebun karet.

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Banyuasin III terletak dijalan Tanjung Remas, RT/RW:03/01 Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III. Disamping itu banyak masyarakat Desa yang rata-rata pekerjaannya menjadi buruh Karet serta ada yang memiliki kebun karet.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme dan digunakan untuk meneliti populasi sampel tertentu (Sugiyono,2010:13). Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung. Data primer yang bersumber dari wawancara langsung kepada responden, dan menggunakan kuesioner mengenai sistem bagi hasil petani karet di Desa Galang Tinggi. Data tersebut berguna untuk melihat sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan keluarga petani karet di Desa Galang Tinggi.

PEMBAHASAN

Analisa Audit Kepatuhan Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang Pada Koprasi plasma mekar sari jaya.

Koprasi Plasma Mekar sari Jaya yang bergerak dalam bidang jasa sedang berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berkesinambungan. Melihat hasil kinerja perusahaan 3 tahun belakangan ini pemilik perusahaan berinisiatif untuk dapat menambah fasilitas dalam bentuk bangunan dan peralatan penunjang lainnya guna memberikan peningkatan pelayanan sehingga proses penyediaan jasa akan berlangsung dengan lebih baik. Oleh karena itu Koprasi Plasma Mekar sari Jaya mengajukan kredit pinjaman modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang pada awal tahun 2007.

Setelah melalui beberapa tahapan pemrosesan kredit tepatnya pada tanggal 8 Juni 2007 Koprasi Plasma Mekar sari Jaya mendapatkan pencairan dana sebagai tambahan modal kerja dalam pelaksanaan pengembangan perusahaan. Dari hasil penelusuran penulis. ada beberapa kesalahan atau kelalaian dalam pencairan kredit yang menjadi perhatian untuk dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi.

Adapun Jenis pembiayaan yang diterima oleh Koprasi Plasma Mekar sari Jaya adalah pembiayaan Murabahah guna keperluan untuk membantu permodalan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya dalam membangun fasilitas gedung dan peralatan lainnya.

Berikut ini adalah prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang terhadap koprasi plasma mekar sari jaya.

1. Penyerahan permohonan kredit Koprasi Plasma Mekar sari Jaya
Pada tahap ini Koprasi Plasma Mekar sari Jaya menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan kredit modal kerja yang berisikan nilai pengajuan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
2. Pengumpulan Data : wawancara, mengisi formulir
Pada tahap ini Koprasi Plasma Mekar sari Jaya melakukan interview serta pengisian formulir pengajuan kredit modal kerja di Bank khususnya di bagian kredit yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bapak Faisal selaku Penyelia Pengelolaan Pembiayaan.
3. Verifikasi & *Site Visit* : barang jaminan, *performance* nasabah.
Pada tahap ini PT. Bank BNI Syariah melaksanakan verifikasi dan *site visit* terhadap objek usaha Koprasi plasma mekar sari jaya, Dalam hal ini pelaksanaan penilaian terhadap objek usaha Koprasi Plasma Mekar sari Jaya dilaksanakan oleh perusahaan penilai yang diminta oleh bank dengan biaya yang akan ditanggung oleh Koprasi plasma mekar sari jaya.
4. Analisa pembiayaan berupa :
 - Analisa Laporan Keuangan
 - Analisa Aspek-aspek lainnya : Umum , Pemasaran
 - Analisa Risiko
 - Analisa Proyeksi KeuanganPada tahap ini PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang menerima laporan keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya untuk periode 2 tahun terakhir yaitu berupa Neraca, Laporan Laba-Rugi yang kesemuanya itu harus sudah di audit oleh tim audit independent.

5. Evaluasi Kebutuhan Pembiayaan

Pada tahap ini PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang sudah dapat melihat berapa besar kebutuhan dana yang diperlukan oleh Koprasi Plasma Mekar sari Jaya beserta kemampuan sekarang dan yang akan datang untuk diharapkan dapat melaksanakan pembayaran pengembalian dana pinjaman sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan.

6. Struktur Fasilitas Pembiayaan

Langkah lebih lanjut yang dilaksanakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang yaitu membentuk tim Kewenangan Kelompok yang terdiri dari Pimpinan Pusat Jakarta Bagian Penyelia Kredit untuk wilayah bagian barat Indonesia regional 2 dibantu dengan beberapa staf baik yang ada di Pusat maupun di Palembang. Adapun tugas tim kewenangan dalam rangka untuk memutuskan Pembiayaan atas pencairan dana yang diterima oleh Koprasi Plasma Mekar sari Jaya yaitu menentukan:

- Jenis Pembiayaan

Dalam hal pengajuan kredit modal kerja oleh Koprasi Plasma Mekar sari Jaya jenis pembiayaan yang ditentukan adalah Jenis Pembiayaan Murabahah.

- Batas Limit Pembiayaan

Sesuai dengan pengajuan kredit yang disampaikan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya sebesar Rp. 7.500.000. 000,- (tujuh milyar lima ratus juta) pihak bank menyetujui untuk dapat direalisasikan.

- Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu kredit yang diberikan kepada Koprasi Plasma Mekar sari Jaya adalah 60 (enam puluh) bulan angsuran

- Metodologi persetujuan/penolakan pembiayaan

Pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah telah melaksanakan tahapan-tahapan sebelumnya terhadap Koprasi Plasma Mekar sari Jaya hingga menghasilkan keputusan persetujuan untuk pembiayaan.

- Proses Keputusan Pembiayaan

Proses keputusan pemzbiayaan akan dilakukan di hadapan notaris di kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah pada tanggal 7 Juni 2007.

- **Penyediaan Fasilitas**

Penyediaan Fasilitas pemberian kredit akan dilaksanakan dalam 3 tahap sesuai dengan perkembangan pembangunan fisik dan peralatan perusahaan.

- **Disposisi Pembiayaan**

Pencairan dana kredit akan dilaksanakan oleh Kepala Cabang mewakili Pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang selaku pemberi kredit dan Mr X selaku pemilik dari Koprasi Plasma Mekar sari Jaya untuk menerima dana kredit modal kerja tersebut.

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Syariah cabang Palembang dalam pencairan kredit kepada Koprasi plasma mekar sari jaya, penulis menemukan beberapa beberapa informasi penting yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu

1. Jumlah pembiayaan

Adapun jumlah pembiayaan yang di terima oleh Koprasi Plasma Mekar sari Jaya adalah Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), akan diperoleh dari pinjaman PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang Adapun jangka waktu pembiayaan kredit dilaksanakan selama 60 (enam puluh) bulan sejak akad ditandatangani pada tanggal 8 Juni tahun 2007.

2. Jaminan dan Pengikatan

Adapun jaminan dan pengikatan kredit modal kerja ini adalah sebagai berikut:

- Objek berupa tanah berikut bangunan yang terletak di KM 10 Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang dengan bukti kepemilikan SHM No. 54/ Karya Baru tanggal 28 September 2000 SU. No. 78/Kr.Baru/2000 tanggal 4 April 2000 terdaftar a/n. AB dengan luas tanah 10 000 M2 dan luas bangunan 4000 M2, jaminan telah diserahkan ke BNI syariah terkait dengan fasilitas Murabahah berjalan dan telah diikat Hak tanggungan I sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak pada di KM 4,5 Kel. 20 Ilir D-IV Kec. Ilir Timur 1 kota Palembang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 17

Kampung 20 Ilir tanggal 29 Desember 1976 SU. No. 14 tanggal 10 Desember 1951 terdaftar a/n. ABC dengan luas tanah 937 M2, luas bangunan 1.744 M2. Jaminan telah diikat Hak tanggungan sebesar Rp. 5.000.0000.000,-(Lima Milyar Rupiah).

3. Persyaratan Realisasi Pembiayaan Murabahah

Adapun persyaratan realisasi atas pembiayaan Murabahah pada Koprasi Plasma Mekar sari Jaya ditandatangani dengan syarat :

- a. Dana uang muka atas pembiayaan murabahah ini sebesar Rp. 676.196.267 telah disetor efektif kerekening Koprasi Plasma Mekar sari Jaya di PT. Bank Negara Indonesia cabang Syariah Palembang yang dibuktikan dengan berita Acara yang dibuat oleh pihak Bank dan Konsulatan Pengawas yang ditunjuk.
- b. Pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 54 Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) telah dilaksanakan atau minimal telah ditandatangani APHT di hadapan Notaris.
- c. Telah ada *Cover Note* dari notaries bahwa setelah selesai proses pengikatan, asli sertifikat akan diserahkan ke Bank.
- d. Telah ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rencana pembangunan fasilitas gedung untuk menunjang operasional Perusahaan XX dari Dinas Tata Kota Palembang, asli surat tersebut diserahkan ke Bank.
- e. Telah ditandatangani Akta Sub Ordinated Loan (SOL) Notaris atas hutang pendiri sebesar Rp. 8.500.000.000,- (Delapan Milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari pinjaman PT. Bank Negara Indonesia Cabang Syariah Palembang, ditambah Rp. 2.535.000.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari dana Koprasi Plasma Mekar sari Jaya sendiri.

- Biaya-biaya administrasi dan pengelolaan pembiayaan yang menjadi beban pihak Koprasi Plasma Mekar sari Jaya sebagai berikut:

- Biaya Administrasi : Rp. 20.000,-
- Biaya Materai : Rp. 36.000,-
- Biaya Asuransi Kebakaran : Rp. 37.000.000,
- dibayar 5 tahun sekaligus.

- Biaya Notaris : Rp. 55.000.000,-
 - Biaya Konsultan pengawas : Rp. 5.500.000,-
 - Biaya pengelolaan rekening : Rp. 15.000,- dibayar bulanan
- f. Realisasi pembiayaan di atas dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening Koprasi Plasma Mekar sari Jaya dengan menandatangani surat permohonan pencairan/ penarikan pembiayaan.
- g. Koprasi Plasma Mekar sari Jaya diharuskan menyetor angsuran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum akhir bulan berjalan dan tidak diperkenankan menunggak pembayaran angsuran.
- h. Aktivitas keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya disalurkan melalui rekening BNI Syariah.
- i. Selama pembiayaan di BNI Syariah Palembang belum lunas, Koprasi Plasma Mekar sari Jaya tidak diperkenankan menerima fasilitas kredit/ pembiayaan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- j. Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 5 % pertahun dari angsuran yang tertunggak selanjutnya digunakan untuk kepentingan sosial.
- k. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan akad pembiayaan, pengikatan jaminan, konsultasi dan asuransi menjadi beban Koprasi plasma mekar sari jaya.
- l. Berkenaan dengan fasilitas pembiayaan ini Koprasi Plasma Mekar sari Jaya tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai atau petugas Bank disemua tingkatan.

Dari penjelasan dan bahasan diatas ada beberapa point yang menjadi sorotan penulis yang menjadi kelemahan dan kekurangan dalam proses kredit modal PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang pada Koprasi Plasma Mekar sari Jaya yaitu :

1. Laporan keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya yang dilampirkan sebagai salah satu syarat administrasi dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang merupakan laporan keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya yang belum mendapatkan audit oleh *auditor independent*.

2. Dana uang muka dari Koprasi Plasma Mekar sari Jaya untuk pencairan kredit sebesar Rp. 676.192.267,- diambil dari jumlah pencairan kredit awal yang diterima yang semestinya harus disetor lebih awal ke rekening Koprasi Plasma Mekar sari Jaya di PT. Bank BNI.
3. Tidak adanya berita acara yang dibuat oleh pihak bank dan konsultan pengawas yang ditunjuk untuk membuktikan penerimaan dana awal sebagai uang muka Koprasi Plasma Mekar sari Jaya ke rekening PT. BNI Syariah.
4. Belum adanya surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas pembangunan gedung Koprasi Plasma Mekar sari Jaya yang baru untuk disampaikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang sebagai syarat administrasi legalitas atas pengajuan kredit modal kerja.
5. Belum adanya surat keterangan dari Notaris yang menyatakan telah mengurus perubahan Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan UU. No. 28 tahun 2004
6. Tidak adanya realisasi biaya asuransi kebakaran yang harus dibayar oleh Koperasi Plasma Mekar sari Jaya atas pencairan dana yang telah dilaksanakan.

Dari point-point dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan dalam bentuk ketidakpatuhan pihak manajemen PT. Bank BNI Syariah terhadap pencarian kredit pada Koprasi plasma mekar sari jaya.

SIMPULAN

1. Laporan Keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya belum di audit oleh *auditor independent*. Hal ini menunjukkan data-data dalam laporan keuangan yang disajikan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya belum dapat dipastikan merupakan data-data yang menggambarkan kinerja Perusahaan sesungguhnya secara wajar karena belum diperiksa oleh pihak akuntan publik yang merupakan pihak independent dan memiliki wewenang untuk dapat memberikan analisa dalam bentuk penilaian wajar atau tidak wajar pada angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya tersebut.
2. Dana uang muka sebagai syarat pencairan kredit Koprasi Plasma Mekar sari Jaya tidak dibayarkan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah

Palembang. Hal ini merupakan kesalahan teknis prosedural dalam pencairan kredit yang semestinya dipatuhi oleh pihak manajemen dalam hal ini oleh PT. Bank BNI Syariah dalam pencairan kredit modal kerja pada koprasia plasma mekar sari jaya.

3. Belum adanya berita acara penerimaan dana awal sebagai uang muka Koprasia Plasma Mekar sari Jaya pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang. Dikarenakan belum diterimanya dana awal yang semestinya sudah disetor dalam rekening Koprasia Plasma Mekar sari Jaya di PT. Bank BNI Syariah maka berita acara penerimaan dana awal sebagai uang muka Koprasia Plasma Mekar sari Jaya tidak dapat di realisasikan dan hal ini merupakan kesalahan teknis prosedural yang semestinya juga harus dilaksanakan oleh pihak manajemen dalam hal ini oleh bagian penyelia kredit terhadap Koprasia plasma mekar sari jaya.
4. Belum adanya izin IMB atas pendirian gedung baru koprasia plasma mekar sari jaya. Lampiran surat IMB ini untuk memastikan agar penggunaan dana kredit yang diterima Koprasia Plasma Mekar sari Jaya dapat dipastikan digunakan dalam rangka pengembangan atas fasilitas gedung Koprasia Plasma Mekar sari Jaya yang dijadikan alasan dalam pengajuan kredit modal kerja ini.
5. Anggaran dasar Koprasia Plasma Mekar sari Jaya belum mengacu pada UU. No. 28 Tahun 2004. Hal ini untuk memastikan bahwa Koprasia Plasma Mekar sari Jaya merupakan perusahaan yang memiliki legalitas secara hukum menurut undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
6. Belum teralisasinya pembayaran asuransi kebakaran atas koprasia plasma mekar sari jaya. Belum teralisasinya pembayaran asuransi kebakaran atas Koprasia Plasma Mekar sari Jaya akan mengurangi jaminan atas resiko yang akan diterima oleh PT. Bank BNI Syariah jika sewaktu-waktu terjadi bencana pada Koprasia Plasma Mekar sari Jaya seperti kebakaran yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuan Koprasia Plasma Mekar sari Jaya dalam melaksanakan pembayaran kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Untung. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta.
- Dan M. Guy, C. Wayne Alderman, Alan. J. Winter. (2003). Auditing, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Hadiwidjaja dan Ec. R.A. Rivai Wirasasmita. (2000). Manajemen Dana Bank, Pionir Jaya, Bandung.
- . (2000), Analisis Kredit, Pionir Jaya, Bandung.
- Halim, Abdul. (1997). *Auditing*, Penerbit AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2000). Standard Akuntan Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.
- IBK. Bayangkara. (2008). Audit Manajemen, Salemba Empat, Jakarta
- J. Supranto. (2001). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, (2002). Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. (2000). Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tim Penyusun. (2007). Pedoman Penulisan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Palembang, Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Palembang.
- William C. Boynton, Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. (2002). *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh, Erlangga. Jakarta.
- Widjaja, Tunggal, Amin. (2000). Manajemen Audit, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta

